

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif BKD 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran BKD, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja 2019.

2.1 UMUM

Diantara misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, merupakan persyaratan yang tak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Misi tersebut diatas memiliki tujuan terkait dengan BKD adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya pelayanan publik yang prima
- Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional dan bebas KKN.

Selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur serta melaksanakan peningkatan manajemen sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tanggung jawab BKD adalah sebagai berikut:

- Paradigma pembinaan PNS terutama dalam upaya pengembangan sistem manajemen kepegawaian termasuk di dalamnya pengembangan terhadap norma, standar dan prosedur kepegawaian mengacu pada manajemen yang berlaku secara nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dicapai standar yang sama dalam pembinaan seluruh PNS di Sumatera Barat, meskipun di masa mendatang sebagian operasional manajemennya terdesentralisasikan ke Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja seiring dengan perkembangan.
- Menciptakan kondisi antara untuk menjembatani tercapainya tujuan terwujudnya kondisi sistem manajemen kepegawaian di masa yang akan datang.
- Menyelenggarakan *capacity building* kelembagaan untuk mewujudkan keberdayaan BKD agar mampu menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan dalam menyelenggarakan kompetensi intinya.
- Melaksanakan penilaian kinerja dan pemetaan potensi aparatur

2.2 RENSTRA BKD TAHUN 2016-2021

VISI DAN MISI

Visi

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang kepegawaian, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui

perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah selama kurun waktu 2016-2021 adalah:

“ MENJADI PENGELOLA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG PROFESIONAL ”

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah:

- a. Pengelola adalah orang yang mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya;
- b. Manajemen kepegawaian adalah proses tertentu dibidang kepegawaian yang mencakup kegiatan-kegiatan penerimaan, penempatan, penggajian, promosi, penilaian kinerja, dan pemberhentian pegawai di lingkungan instansi pemerintah;
- c. Profesional adalah memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sesuai dengan substansi dan kompetensi bidang tugas serta perilaku yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi

Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi

dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah negara.

Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Mewujudkan manajemen SDM Aparatur yang bersih dan bebas KKN dan pelayanan kepegawaian yang prima;
- b. Mewujudkan tata kelola (pada BKD) yang baik;

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan Misi yang telah dirumuskan dengan pertimbangan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut tujuan pelaksanaan manajemen kepegawaian Provinsi Sumatera Barat secara umum adalah agar tersedianya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara profesional melalui pembinaan karier berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan titik berat kepada sistem prestasi kerja, dengan jumlah yang sesuai dengan formasi masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah untuk terlaksananya pemerintahan yang baik yang dapat diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pencapaian tujuan umum pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah, karena pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam

melaksanakan tugas berada pada pimpinan masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah dimana pegawai dimaksud ditempatkan dan lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Secara khusus berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang kepegawaian, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Misi pertama, Mewujudkan manajemen SDM Aparatur yang bersih dan bebas KKN dan pelayanan kepegawaian yang prima.

Tujuan : Meningkatnya profesionalitas aparatur.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur.

Misi kedua, Mewujudkan tata kelola (pada BKD) yang baik.

Tujuan : Meningkatnya kinerja organisasi.

Sasaran : Meningkatnya tata kelola organisasi.

Berikut matrik hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
BKD Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Visi : MENJADI PENGELOLA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG PROFESIONAL			
Misi 1 : Mewujudkan Manajemen SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN dan pelayanan kepegawaian yang prima.			
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur	a Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan b Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70% c Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) d Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola (pada BKD) yang baik			
2	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	e Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang telah dirubah, disusun strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian melalui penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan efektif dan efisien, pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui sistim terbuka dan kompetitif sesuai dengan aturan, pembinaan kedisiplinan pegawai dan pemberian sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

kepegawaian serta memperbaiki kualitas pengadaan seleksi CPNS agar mendapatkan CPNS yang berkualitas;

2. Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi data informasi kepegawaian dan pengembangan aplikasi sistim informasi manajemen kepegawaian berbasis komputer sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian yang semakin mudah, cepat, bebas KKN dan tidak diskriminatif, terutama meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan, memperbaiki prosedur dan mekanismenya atau menyusun SOP pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Upaya Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian, ditetapkan dengan kebijakan:
 - a. pendistribusian pegawai sesuai keterampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi.
 - b. Pemetaan dan bezzeting SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi secara rutin dan berkala dalam rangka menciptakan komposisi SDM aparatur yang ideal berdasarkan analisis jabatan, beban kerja (ABK) dan perilaku.

- c. Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja, etos kerja PNS dan kedisiplinan PNS.
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistim pengadaan CPNS melalui Sistim CAT (*Computer Assisted Test*) yaitu sistim rekrutmen yang berusaha mempertemukan orang sehingga mengurangi pertemuan antara penyelenggara dengan pelamar atau rekrutmen diselenggarakan dengan bersih, transparan dan bebas KKN.
2. Upaya Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian dalam bentuk Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui verifikasi data, sinkronisasi data, up dating data kepegawaian, pengembangan aplikasi SIMPEG .
3. Upaya Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dengan tujuan perubahan pola dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian, dengan mengembangkan kualitas petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas mekanisme/prosedur/SOP pelayanan ditetapkan kebijakan:
- a. Mengembangkan sistim informasi layanan kepegawaian dengan penyebaran indikator dan informasi kepegawaian lainnya serta pemanfaatan teknologi informasi kepada pengguna jasa kepegawaian.
 - b. Meningkatkan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana dan mudah dimengerti.
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua RPJMD 2016-2021 yaitu " Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional" dengan tujuan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya kompetensi aparatur daerah, meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja.

Sebagai bagian dari indikator perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat SKPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

A. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

1	Ujian Dinas Tingkat I Dan Tingkat II
2	Pengelolaan Jabatan Fungsional
3	Pengendalian Administrasi Alih Status dan Pemindahan Pegawai ASN
4	Pemetaan Potensi Pegawai
5	Seleksi ASN Untuk Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN
6	Pendampingan Seleksi Penerimaan Calon Pra IPDN
7	Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS
8	Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS
9	Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data Kepegawaian
10	Workshop Bimbingan Konseling PNS
11	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai
12	Rapat Koordinasi Kepegawaian
13	Pengelolaan Pensiun Dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS
14	Implementasi Tambahan Penghasilan Dengan SKP Online
15	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi
16	Pengelolaan Administrasi Status Kepegawaian
17	Bimtek Jabatan Fungsional
18	Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian
19	Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
20	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
21	Pengelolaan Tata Naskah PNS
22	Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur

23	Pengelolaan Mutasi Jabatan
24	Pembekalan PNS Yang Akan Purna Tugas
25	Indeks Profesionalitas ASN
26	Survey Kepuasan Masyarakat
27	Pengembangan Sistem Informasi ASN
28	Workshop Penguatan Kerjasama Tim
29	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja
30	Rekrutmen CPNS Prov. Sumbar
31	Peringatan HUT Korps Organisasi Profesi ASN
32	Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai
33	Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN
34	Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
35	Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
36	Sistem Informasi Pemetaan Pegawai

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra BKD telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Disamping itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada Laporan Kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang terukur.

Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TERPILIH

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	Jumlah jabatan yang terisi sesuai kompetensi dibagi dengan formasi jabatan yang ada	Bidang Jabatan dan Kinerja ASN
			Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II			
			Seleksi ASN Untuk Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN			
			Pendampingan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN			
			Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS			
			Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS			
			Workshop Bimbingan Konseling PNS			
			Rapat Koordinasi Kepegawaian			
			Implementasi Tambahan Penghasilan Dengan SKP Online			
			Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi			
			Bimtek Jabatan Fungsional			

			Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian			
			Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya			
			Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS			
			Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur			
			Pengelolaan Mutasi Jabatan			
			Pembekalan PNS Yang Akan Purna Tugas			
			Indeks Profesionalitas ASN			
			Workshop Penguatan Kerjasama Tim			
			Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja			
			Rekrutmen CPNS Prov. Sumbar			
			Peringatan HUT Korps Organisasi Profesi ASN			
			Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN			
			Sistem Informasi Pemetaan Pegawai			
2			Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Persentase OPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%		Bidang Formasi dan Informasi
			Pengelolaan Jabatan Fungsional			
			Pemetaan Potensi Pegawai			

			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai			
			Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat			
			Pemutakhiran dan sinkronisasi data kepegawaian			
3		Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan	Sekretariat
			Pengembangan sistem informasi ASN			
			Survey Kepuasan Masyarakat			
4			Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dihitung dengan cara membandingkan Jumlah SK yang dikeluarkan dibandingkan dengan usul yang masuk waktu dibagi dengan usul layanan	Bidang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun
			Pengelolaan administrasi status kepegawaian			
			Pengendalian administrasi Alih status dan Pemindahan Pegawai ASN			
			Pengelolaan kenaikan pangkat PNS			
			Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai			
			Pengelolaan Tata Naskah PNS			
			Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS			

2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada Tahun Anggaran 2019, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	A Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	92.00%
		B Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%	92.00%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	C Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.00%
		D Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	94.00%
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	E Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB

2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, BKD Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

BKD telah membuat penetapan kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan

tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2019. Perjanjian kinerja BKD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	a. Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan b. Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%	92,00% 92,00%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	a. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) b. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	92,00% 94,00%
3	Meningkatnya tata kelola Organisasi	a. Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB